



Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli

Kartini Lase¹⁾, Aferiaman Telaumbanua²⁾, Dedi Irawan Zebua³⁾, Idarni Harefa⁴⁾

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nias, Indonesia

kartinilase29@gmail.com¹⁾, aferiaman.tel@gmail.com²⁾
dedizebua8@gmail.com³⁾, idarniharefa@gmail.com⁴⁾

Abstrak

Penelitian ini menganalisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli tahun anggaran 2019-2022 menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi. Metode penelitian ialah kualitatif. Hasil menunjukkan tingkat efektivitas stabil namun tingkat efisiensi mengalami fluktuasi. Pemerintah Desa Saewe berhasil menjaga efektivitas anggaran secara konsisten, namun efisiensi anggaran cenderung tidak stabil karena fluktuasi dalam penggunaan anggaran. Meskipun pada tahun 2019 dan 2021 mencapai kriteria cukup efisien, tahun 2020 dan 2022 menunjukkan kriteria tidak efisien dan kurang efisien, menandakan penggunaan anggaran tidak optimal.

Kata kunci: Kinerja Keuangan, Efektif, Efisiensi, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

Abstract

This research analyzes the Financial Performance of Village Revenue and Expenditure Budget in Saewe Village, Gunungsitoli District for the fiscal years 2019-2022 using effectiveness and efficiency ratios. The research method employed is qualitative. The results indicate a stable level of effectiveness but fluctuating efficiency. The Saewe Village Government has consistently maintained budgetary effectiveness; however, budget efficiency tends to fluctuate due to variations in budget utilization. Although the criteria for sufficient efficiency were met in 2019 and 2021, 2020 and 2022 show criteria of inefficient and less efficient, indicating suboptimal budget.

Key words: Financial Performance, Effectiveness, Efficiency, Village Revenue and Expenditure Budget.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. Oleh karena itu, Indonesia mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Good governance adalah suatu sistem nilai, kebijakan, dan institusi dimana interaksi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta mempengaruhi dan mengelola urusan ekonomi, sosial dan publik (Muhammad Asir et al., 2023). Oleh karena itu good governance sendiri merupakan suatu sistem nilai, kebijakan dan institusi yang mengedepankan keterbukaan, transparansi dan nilai-nilai baik dalam menjalin interaksi dengan seluruh sektor publik. Sifat good governance tersebut bila diterapkan, dapat membantu organisasi sektor publik menjalankan dan memimpin pemerintahan serta membuat pemerintahan bertanggung jawab kepada publik atas kinerjanya. Menurut (Cahyani et al., 2024), penilaian kinerja pemerintah adalah :

Penilaian kinerja pemerintah didasarkan pada *value for money*, dimana diharapkan anggaran yang dikelola tersebut dapat dibelanjakan dengan mempertimbangkan nilai efisiensi dan efektifitas. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efisiensi apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya (*spending well*). Sedangkan suatu organisasi, program atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dapat dikatakan (*spending wisely*) (Kosasih, D. A., Sugiyanto, E., & Yusoff, 2021).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, secara umum menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah meliputi seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan pada periode tahun anggaran 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala desa mempunyai kewenangan tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa, dimana dalam pelaksanaannya dibantu oleh PTPKD (Pelaksanaan Teknik Pengelolaan keuangan desa). PTPKD sendiri terdiri dari kepala seksi, bendahara desa, dan sekretaris desa (Auliyah & Saleh, 2024).

Pengelolaan keuangan desa menurut Pemendagri No. 113 Tahun 2014 juga menjelaskan bahwa APBDes meliputi pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa adalah seluruh penerimaan yang berasal dari rekening desa yang menjadi hak untuk setiap desa dalam satu periode anggaran. Pendapatan desa meliputi pendapatan asli desa, pendapatan transfer dari daerah atau pusat dan pendapatan lain lain. belanja desa adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh desa melalui rekening desa dan merupakan kewajiban setiap desa untuk jangka waktu satu tahun. pembiayaan desa mencakup seluruh penerimaan yang harus di bayarkan kembali atau semua pengeluaran yang harus di terima kembali (Moridu et al., 2022).

Pengelolaan keuangan desa yang baik menunjukkan kinerja pemerintah desa yang baik, namun tidak semua pemerintah desa menjalankan dan bertanggung jawabkan hasil keuangannya. Oleh sebab itu, banyak masyarakat yang kurang percaya atas hasil kerja yang dilakukan oleh pemerintah desa sehingga timbullah dugaan-dugaan masyarakat yang menyatakan pihak desa telah melakukan penyimpangan atas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa untuk keperluan pribadi. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli dimana masyarakat desa melayangkan surat pengaduan kepada Komisi I DPRD kota Gunungsitoli mengenai bangunan yang dianggap tidak sesuai dengan spesifikasi. yang mana, masyarakat menduga pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi karena dana desa tersebut di gunakan untuk keperluan lain. oleh sebab itu, untuk mencegah hal serupa terjadi lagi di kemudian hari, perlu diketahui seberapa baik dan besarnya suatu pengelolaan pendapatan dana desa dengan cara menganalisis kinerja keuangannya.

Analisis kinerja keuangan ini penting karena dapat menunjukkan tercapainya tujuan kinerja keuangan yang telah ditetapkan, dapat menjadi pedoman di masa depan dalam pengambilan keputusan, dapat menjadi perbandingan antara kinerja keuangan dari tahun ke tahun, dan dapat menjadi bukti nyata kepada masyarakat agar masyarakat tidak berasumsi buruk terhadap pemerintahan desa. dalam menganalisis kinerja keuangan, rasio merupakan alat analisis yang harus di gunakan untuk menilai baik/buruknya kinerja keuangan. Di ketahui bahwa pada organisasi komersial, penggunaan analisis rasio sebagai alat analisis keuangan telah banyak di terapkan, namun pada organisasi publik



khususnya pemerintah desa penggunaan analisis rasio sebagai alat analisis keuangan masih sangat terbatas, karena sampai dengan saat ini penyusunan APBDes di lakukan berdasarkan perimbangan anggaran tradisional sehingga sering kali mengabaikan rasio keuangan dalam APBDesnya (Purwanti, 2021).

Serta keterbatasan pelaporan keuangan pada badan pemerintah desa yang berbeda ruang lingkup dan sifatnya dengan pelaporan keuangan pada badan usaha komersial, serta penilaian keberhasilan APBDes lebih terfokus pada pencapaian tujuan sehingga tidak memperhatikan perubahan posisi pada struktur APBDesnya. Maka berdasarkan fenomena yang telah diuraikan maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli".

METODE

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang dilakukandengan cara mengumpulkan, menyusun dan menganalisis data, untuk memperoleh gambaran yang sesuai atau jelas mengenai masalah yang diteliti, sedangkan penelitian kuantitatif adalah data yang diperoleh dari laporan-laporan yang berhubungan dengan penelitian (Rosa & Kartinah, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli periode tahun 2019-2022 dengan menggunakan rasio keuangan daerah di antaranya rasio efektifitas dan rasio efisiensi dapat di ketahui sebagai berikut:

1. Rasio efektifitas

Hasil analisis kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan menggunakan rasio efektifitas di Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli, menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Dimana, berdasarkan hasil perhitungan rasio efektifitasnya selama 4 periode semuanya masuk dalam kategori sangat efektif dan efektif. Mulai dari tahun 2019, mendapatkan hasil presentase sebesar 100,13% sehingga masuk dalam kategori sangat efektif. Ditahun 2020 mengalami sedikit penurunan dimana hasilnya sebesar 100% sehingga masuk kategori efektif. selanjutnya pada tahun 2021 hasilnya sama dengan tahun 2020 sebesar 100% sehingga masuk kategori efektif. Dan terakhir pada tahun 2022 mendapatkan hasil sebesar 99,98% dan masih tergolong kategori efektif. Disini dapat dilihat bahwa dari tahun 2019-2022 setiap tahunnya tidak mengalami perubahan yang begitu jauh. Sehingga hasil presentasi rasio efektifitasnya selama 4 periode masuk dalam kategori efektif karena yang mana di ketahui bahwa hasil perhitungan rasio efektifitasnya mencapai 100% dan ini menunjukkan tingkat efektifitas yang sangat tinggi. Artinya selama 4 tahun pemerintah desa telah melaksanakan dan telah berusaha dengan baik dalam penggunaan anggarannya. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (Inayah, 2022) di Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember bahwa berdasarkan rasio efektivitas Desa Arjasa telah efektif dalam merealisasikan penerimaan pendapatan asli desa karena dari tahun 2018-2020 nilai rasio efektivitas yang diperoleh mencapai 100%.

2. Rasio efisiensi

Hasil perhitungan analisis kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa Di Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli dengan menggunakan rasio efisiensi periode tahun 2019-2022, selalu mengalami perubahan. Dimana, hasilnya tidak menentu setiap tahunnya seperti pada tahun 2019 tingkat rasio efisiensinya mencapai 80,59% sehingga masuk dalam kategori cukup efisien. Selanjutnya pada tahun 2020, tingkat efisiensinya mengalami kenaikan yang sangat drastis sebesar 125,35% Ini menunjukkan kategori tidak efisien. Hal ini di sebabkan karena ada beberapa program yang belum terealisasi pada tahun 2019, sehingga kembali di realisasikan pada tahun 2020 serta adanya penambahan program dimana pemerintah desa melaksanakan pembangunan desa dan penanggulangan bencana. Pembangunan desa mulai dari pembangunan jalan, pengerasan jalan, pembangunan peningkatan prasarana jalan, pembangunan jambanisasi, dan lain-lain. Sedangkan pada penanggulangan bencana mulai dari kegiatan penanggulangan dan belanja barang dan jasa yang di serahkan kepada masyarakat (BLT-DD). Sehingga pada tahun 2020 pemerintahan desa melakukan pengeluaran atau belanja desa lebih dari pendapatan yang di terima. Pada tahun 2021 tingkat efisiensinya kembali mengalami penurunan dengan hasil 81,60%. Sehingga masuk kategori cukup efisien. Terakhir tahun 2022 menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 98,87% sehingga masuk kategori kurang efisien. Hal ini juga di sebabkan karena peningkatan anggaran di bidang penanggulangan bencana darurat melebihi dari tahun tahun sebelumnya. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Reysa et al., 2022) pada Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan bahwa berdasarkan aspek efisiensi, pada tahun 2015 dan 2016 yaitu tidak efisien sebesar 100%, dan tahun 2017 cukup efisien yaitu 87,93%.

3. Terlepas dari hasil perhitungan rasio efektifitas yang sangat memuaskan dan hasil perhitungan rasio efisiensi yang tidak begitu baik, ternyata pada tahun 2019-2022 pelaksanaan program-program pada Desa Saewe masih banyak yang belum terealisasi sehingga menimbulkan adanya SILPA setiap tahunnya. Di mulai dari tahun 2019 pada tahun ini banyak program yang belum terealisasi yang terbagi dalam 3 bidang yaitu bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Pada bidang pelaksanaan pembangunan desa, terdapat 5 program yang belum terealisasi yaitu program kursus pelajaran umum pada pelajar, program pengembangan dan pembinaan sanggar seni/belajar, program pelatihan bina keluarga balita (BKB), program pelatihan bina keluarga remaja (BKR), dan program pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (gorong, selokan, pembangunan dwiker plat di jalan pramuka 1 (satu) dan parit di jalan pramuka menuju parit di belakang rumah A.Siji Lase). Pada bidang kemasyarakatan desa terdapat 2 program yang belum terealisasi yaitu program sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa (pembangunan lapangan bola volly di jalan ewalida dusun I Desa Saewe) dan program pembinaan LKMD/LPM/LPMD (operasional LPM). Selanjutnya pada bidang pemberdayaan masyarakat terdapat 4 program yang belum terealisasi yaitu program bimtek/pelatihan/pengenalan TTG untuk perikanan darat/nelayan (pembuatan rumpon), program bimtek/pelatihan/pengenalan TTG untuk pertanian/perternakan, program pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan (pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak stunting) dan program pelatihan pengelolaan BUMDes (pelatihan dilaksanakan oleh Pemdes). Dari banyaknya program yang tidak terealisasi tersebut maka terdapat SILPA sebesar Rp. 459.665.498,21.



Pada tahun 2020, pemerintah Desa Saewe dalam pelaksanaan anggaran belanja sudah dilaksanakan semaksimal mungkin sehingga program-program yang telah direncanakan hampir terealisasi secara maksimal. Akan tetapi pada tahun 2020 juga masih terdapat 4 program yang belum terealisasi yaitu pertama, pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu program pelaksanaan dan sosialisasi penjangkangan dan penyaringan perangkat desa. Kedua, pada bidang pelaksanaan pembangunan desa yaitu program pelatihan pendidikan bagi masyarakat (pelatihan komputer). Ketiga pada bidang pemberdayaan masyarakat desa yaitu program pelatihan pengelolaan BUMDes dan keempat, pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yaitu belanja tidak terduga. Oleh karena adanya program yang masih belum terealisasi pada tahun 2020 maka terdapat SILPA sebesar Rp. 108.901.746,71.

Pada tahun 2021, masih terdapat program yang sudah di anggarkan namun belum terealisasi secara maksimal dan tidak mencapai target anggaran yang telah di tentukan di antaranya yaitu pertama, pada bidang pelaksanaan pembangunan desa tepatnya pada sub bidang kawasan pemukiman, kedua pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak tepatnya pada sub bidang keadaan mendesak (BLT-DD). Ketiga, pada bidang pemberdayaan masyarakat desa tepatnya pada sub bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Akibat program yang belum terealisasi secara maksimal tersebut Sehingga terdapat SILPA sebesar Rp. 366.376.236,54. Akan tetapi program dan bidang lain pada tahun 2021 sudah terealisasi secara maksimal.

Pada tahun 2022, sama seperti pada tahun 2021 dimana terdapat program yang sudah di anggarkan namun belum terealisasi secara maksimal dan tidak mencapai target anggaran yang telah di tentukan diantaranya yaitu pertama, pada bidang pelaksanaan pembangunan desa tepatnya pada sub bidang kesehatan dan sub bidang kawasan pemukiman. Kedua pada bidang pemberdayaan masyarakat tepatnya pada sub bidang pemberdayaan perempuan. Hal ini menyebabkan, adanya SILPA sebesar Rp. 383.864.564,54. Akan tetapi program dan bidang lain pada tahun 2022 sudah terealisasi secara maksimal.

Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya SILPA disebabkan oleh banyaknya program yang belum terealisasi secara maksimal bahkan ada program yang sama sekali tidak dicapai atau dijalankan. Akan tetapi SILPA yang tidak digunakan pada tahun 2019 tersebut ditambahkan pada realisasi pendapatan pada tahun 2020 untuk kembali digunakan dan dilaksanakan begitu pun tahun-tahun seterusnya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak pemerintah Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli telah berusaha memberikan dan melakukan yang terbaik dalam pencapaian setiap program yang telah direncanakan. Akan tetapi sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada pemerintah desa yaitu sekretaris desa, ia menyatakan bahwa adanya program yang belum terealisasi dari tahun 2019-2022 karena di sebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama disebabkan oleh keterlambatan dalam pencairan anggaran atau transfer anggaran dari Pemerintah Kota Gunungsitoli ke rekening Kas Desa (RKD) dimana rata-rata baru dicairkan pada akhir tahun yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan terlambat dan bahkan tidak tercapai. Yang kedua, disebabkan oleh keterlambatan dalam penetapan anggaran pendapatan dan belanja APBDes dimana penetapannya dilaksanakan diatas bulan Mei tahun berkenan

hal ini berpengaruh pada terhambatnya dalam pelaksanaan maupun kegiatan. Yang ketiga, seperti diketahui pada tahun 2019 adanya kebijakan dan peraturan pemerintah terutama pada saat pandemi covid-19 dimana adanya pembatasan kegiatan masyarakat sehingga beberapa program tidak dapat dilaksanakan sehingga program yang dianggarkan pada tahun tersebut dan tahun selanjutnya tidak dapat direalisasikan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan hasil pembahasan sebelumnya, penulis menyimpulkan dari hasil kajian efektifitas dan efisiensi kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 di Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli adalah sebagai berikut:

Efektifitas kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 setiap tahunnya tidak mengalami perubahan yang begitu jauh. Pada tahun 2019, memiliki tingkat efektifitas terbesar yaitu 100,13% sehingga masuk dalam kategori sangat efektif. Pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan dari tahun 2019 tapi tidak begitu jauh selisihnya yaitu sebesar 100% sehingga masuk kategori efektif. Sedangkan pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan dari tahun 2020 dan 2021 namun juga tidak jauh selisihnya yaitu sebesar 99,98% sehingga masuk dalam kategori efektif. Pada tahun 2019-2022 dapat dilihat bahwa pemerintah Desa Saewe telah melaksanakan kewajibannya dalam mewujudkan tingkat efektifitas kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan baik dan semaksimal mungkin.

Efisiensi kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 selalu mengalami perubahan. Dimulai pada tahun 2019 memiliki tingkat efisiensi sebesar 80,59% dengan kategori cukup efisien. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang sangat drastis yaitu sebesar 125,35%, sehingga masuk kategori tidak efisien. Pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar 81,60% dengan kategori cukup efisien. Dan pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan sebesar 98,87% sehingga masuk kategori kurang efisien. Pada tahun 2019 dan tahun 2021 memiliki kriteria cukup efisien yang menunjukkan pemerintah Desa Saewe sudah berusaha semaksimal mungkin dalam penggunaan anggarannya meskipun hanya masuk dalam kategori cukup efisien. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2022 memperoleh kriteria tidak efisien dan kurang efisien karena di pengaruhi oleh penggunaan anggaran yang tidak maksimal. Jadi, dapat dilihat bahwa pemerintah Desa Saewe selama 4 periode yaitu dari tahun 2019-2022 belum melaksanakan atau mewujudkan tingkat efisiensi kinerja keuangan dan belanja desa dengan baik dan maksimal dalam pemerintahannya.

Adanya SILPA setiap tahunnya di Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli karena banyaknya program yang belum terealisasi yang di sebabkan oleh keterlambatan dalam pencairan anggaran atau transfer anggaran dari pemerintah Kota Gunungsitoli ke rekening kas desa (RKD) dimana rata-rata baru dicairkan pada akhir tahun yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan terlambat dan bahkan tidak tercapai, juga disebabkan oleh keterlambatan dalam penetapan anggaran pendapatan dan belanja APBDes dimana penetapannya dilaksanakan diatas bulan Mei tahun berkenan hal ini berpengaruh pada terhambatnya dalam pelaksanaan maupun kegiatan, dan pada tahun 2019 adanya kebijakan dan peraturan pemerintah terutama pada saat pandemi covid-19 dimana adanya pembatasan kegiatan masyarakat sehingga beberapa program tidak



dapat dilaksanakan sehingga program yang dianggarkan pada tahun tersebut dan tahun selanjutnya tidak dapat direalisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Auliyah, I., & Saleh, W. (2024). Kinerja Keuangan Perusahaan Ditinjau dari Debt to Equity Ratio dan Return on Asset: Literature Review. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(2), 1001–1011.
- Cahyani, A. D., Putri, S. M., Naka, O. A., & Lestari, T. N. (2024). Literature Review: Implementasi Etika Bisnis Dengan Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(2), 76–88. <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.316>
- Inayah, Z. (2022). ANALISIS STRUKTUR MODAL, PROFITABILITAS DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (PENELITIAN LITERATURE REVIEW MANAJEMEN KEUANGAN). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 788. <https://dinastirev.org/JMPIS>
- Kosasih, D. A., Sugiyanto, E., & Yusoff, N. M. (2021). (2021). The influence of risk management on financial performance of banking sector in Indonesia. *Management Science Letters*, 11(2), 1547-1554.
- Moridu, I., Tomu, A., Risna Sari, A., Rahman, M. R. G., & Posumah, N. H. (2022). Analysis of The Effect Of Managerial Ownership And Financial Performance On Dividend Policy: Review Literature Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan Kinerja Keuangan Terhadap Kebijakan Dividen: Review Literature. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3(6), 3512–3518. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Muhammad Asir, Yuniawati, R. A., Mere, K., Sukardi, K., & Anwar, M. A. (2023). Peran manajemen risiko dalam meningkatkan kinerja perusahaan: studi manajemen sumber daya manusia. *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA)*, 4(1), 32–42. <https://doi.org/10.37631/ebisma.v4i1.844>
- Purwanti, D. (2021). Determinasi Kinerja Keuangan Perusahaan : Analisis Likuiditas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan (Literature Review Manajemen Keuangan). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(5), 692–698. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5.593>
- Reysa, R., Fitroh, U., Rizqi Wibowo, C., & Rustanti, D. (2022). Determinasi Kebijakan Dividen Dan Kinerja Perusahaan: Kepemilikan Manajerial Dan Kinerja Keuangan (Literature Review Manajemen Keuangan). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 364–374. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.881>
- Rosa, T., & Kartinah. (2023). Studi Literatur: Analisis Kinerja Keuangan pada Perusahaan Menggunakan Literature Review. *ANALYSIS: Accounting, Management, Economics, and Business*, 1(2), 103–113. <http://journals.eduped.org/index.php/analysis>